

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA DI ERA PERKEMBANGAN IPTEK

Finanda Resta Claudia, Siti Tiara Maulia

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi
Alamat e-mail : restayeye95@gmail.com, sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstract

The implementation of Pancasila values in the development of Science and technology aims to create good citizens with the ability to master science and technology so that they are not easily affected by information that does not match facts or hoaxes. The application of Pancasila democracy in the development of Science and technology also ensures that science and technology are developed to improve the welfare of society, including the welfare of Indonesian citizens. This paper aims to find out and explain the implementation of Pancasila as the basis of the state in maintaining the existence of the Indonesian nation. The results showed a picture of the implementation of the democratic values of Pancasila in the life of the nation and state amid the development of Science and Technology (Science and technology).

Keywords: Democracy, Pancasila, Science And Technology

Abstrak

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik dengan kemampuan menguasai IPTEK sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak sesuai fakta atau hoaks. Penerapan demokrasi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjamin bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan mengenai implementasi Pancasila sebagai dasar Negara dalam menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan gambaran mengenai implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Kata Kunci : Demokrasi, Pancasila, Iptek

PENDAHULUAN

Di zaman modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan IPTEK yang sangat pesat dan penting sehingga berdampak pada banyak aspek kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tidak hanya membawa dampak positif dan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa berbagai dampak negatif (Suraswati, Annie, 2009).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) harus berakar pada budaya dan ideologi nasional Indonesia yang dikenal dengan Pancasila. Pancasila sebagai Pancasila sebagai dasar nilai-nilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memastikan bahwa perkembangan IPTEK sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Pancasila juga sebagai acuan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan akhlak mulia bangsa Indonesia. Oleh karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi harus disesuaikan

dengan ideologi Pancasila agar perkembangan teknologi tidak membahayakan dan dapat mencapai tujuan yang baik bagi bangsa Indonesia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipersembahkan kepada umat dan kemanusiaan demi meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan dan teknologi harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bermasyarakat, serta memperkuat lembaga demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan Pancasila.

METODE PENELITIAN

Jenis pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang diperlukan melalui studi literatur yang tujuannya untuk dapat mendeskripsikan, menjelaskan serta menganalisis fakta dan data yang diperoleh dari artikel, jurnal-jurnal sebelumnya yang mendukung tema penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Demokrasi Pancasila di Indonesia

Kata *Demos* berasal dari bahasa Yunani berarti rakyat/masyarakat dan kata *Kratos/Kratein* berarti kekuasaan. Demokrasi berarti sistem pemerintahan rakyat. Konsep dasar Demokrasi yakni *rakyat berkuasa* (*Government of rule by the people*). Demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga kedaulatan berada ditangan rakyat (Prayitmo, tt: 4).

Sejak awal berdirinya, Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun ada beberapa perubahan atau penyesuaian terhadap demokrasi yang diperkenalkan di Indonesia. Dari tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer pada tahun , yang mengangkat presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada tahun 1959 hingga 1966, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang memusatkan segala keputusan dan pemikiran pada kepala negara saat itu, yaitu Presiden Sukarno. Era Orde Baru pada tahun 1967 hingga 1998 mengedepankan demokrasi Pancasila, sebuah konsep demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pasca Orde Baru, sistem demokrasi era reformasi mengarah pada demokrasi liberal, memberikan kebebasan kepada individu, terutama mengenai hak-haknya sebagai manusia, individu, dan warga negara.

Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila yang berarti pelaksanaan sistem demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila suatu kesepakatan dihasilkan dengan bermusyawarah mufakat untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Demokrasi juga membangun sikap nilai-nilai demokratis , seperti kesetaraan, toleransi, dan kebebasan.

Demokrasi Pancasila juga memuat nilai dan tujuan yang terkandung dalam sila Pancasila. Istilah ini pertama kali secara formal dituangkan dalam Ketetapan MPRD

No.XXXVII/MPRS/1968, yang menjelaskan tentang tata cara konsultasi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila, antara lain :

1. Kedaulatan Rakyat : Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama demokrasi Pancasila. Rakyat mempunyai kekuasaan penuh dan hak untuk memilih pemimpinnya melalui proses pemilihan umum yang demokratis
2. Kekuasaan Tersebar : Kekuasaan didistribusikan di antara masyarakat dan lembaga pemerintah yang berwenang.
3. Partisipasi Publik : Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam demokrasi Pancasila. Warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses musyawarah dan perwakilan untuk mencapai konsensus.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia : Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan melindungi hak-hak kelompok minoritas, termasuk hak atas pendidikan, hak politik, dan hak-hak lain yang dimiliki seluruh warga negara.
5. Menjunjung Tinggi HAM : Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan menghargai harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip HAM

Penerapan demokrasi Pancasila di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk menjamin pembangunan teknologi yang berkelanjutan dan beretika. Prinsip umum permusyawaratan dan representasi berbasis kearifan Pancasila menekankan perlunya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demokratis. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengembangkan teknologi dan wajib menghargai serta menghargai kebebasan orang lain. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus terbuka terhadap kritik, pengujian, dan perbandingan terhadap penemuan teori-teori lain.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demokratis juga menjamin berkembangnya teknologi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang memudahkan dan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila ini sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak merugikan umat manusia dan bangsa Indonesia.

Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Perkembangan IPTEK

Pelaksanaan demokrasi Pancasila di era iptek seperti sekarang ini memerlukan perhatian pada tantangan ideologi alternatif, eksklusivisme sosial, implementasi nilai Pancasila, pendidikan Pancasila, demokrasi di era digital, pengembangan iptek yang berbasis nilai Pancasila, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengembangkan teknologi dan wajib menghargai serta menghargai kebebasan orang lain. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus terbuka terhadap kritik, pengujian, dan perbandingan terhadap penemuan teori-teori lain.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demokratis juga menjamin berkembangnya teknologi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila,

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang memudahkan dan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila ini sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak merugikan umat manusia dan bangsa Indonesia.

Menurut Cipto, et al. (2002: 31-37) nilai-nilai demokrasi Pancasila antara lain:

1. Kebebasan menyatakan Pendapat

Kebebasan berekspresi merupakan hak warga negara biasa dan harus dijamin secara hukum dalam sistem politik demokratis (Dahl, 1971). Kebebasan ini diperlukan karena dalam era pemerintahan terbuka seperti sekarang ini, setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya setiap saat. Pada tahap transisi demokrasi saat ini, kerangka sosiopolitik sedang berubah. Perekonomian, budaya, agama, dan teknologi seringkali menimbulkan permasalahan bagi warga negara dan masyarakat pada umumnya. Ketika warga negara atau warga negara ingin kepentingannya dipenuhi oleh negara, dan permasalahan tersebut sangat berdampak pada hak-haknya, maka masyarakat sendiri yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyampaikan keluhannya kepada pemerintah. Masyarakat boleh memberikan informasi kepada pejabat seperti kepala desa, camat, bupati, anggota DPRD/DPR, bahkan presiden melalui percakapan langsung, surat, media massa, tulisan buku, atau perwakilan pemerintah.

2. Kebebasan Berkelompok

Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warganegara. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Dalam era modern kebutuhan berkelompok ini semakin kuat tumbuhnya. Persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang sedemikian kompleks seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar.

3. Kebebasan Berpartisipasi

Di negara demokrasi berkembang seperti Indonesia, pemungutan suara seringkali dianggap sebagai bentuk kebebasan partisipasi politik yang paling penting. Secara umum negara demokrasi berkembang selalu berharap agar jumlah pemilih atau peserta pemilu dapat memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Dalam demokrasi sebenarnya tidak ada paksaan untuk memilih.

4. Kesetaraan Antar Warga

Nilai ini diperlukan dalam masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multietnis, multibahasa, multiregional, dan multiagama. Heterogenitas masyarakat Indonesia seringkali menimbulkan permasalahan, terutama ketika terjadi kesalahpahaman antar kelompok sehingga menimbulkan konflik antar kelompok yang meluas.

5. Kerja sama

Kepercayaan di kalangan politisi adalah nilai fundamental lain yang diperlukan bagi munculnya demokrasi. Jika tidak ada kepercayaan, kurangnya kepercayaan kemungkinan besar akan melemahkan dukungan dan menyulitkan pemerintah untuk melaksanakan agendanya.

6. Rasa Percaya (Trust)

Kerja sama sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kolaborasi hanya mungkin terjadi jika masing-masing orang atau kelompok bersedia mengorbankan sesuatu dari apa yang dicapai oleh

kolaborasi. Kolaborasi bukan berarti mencegah perselisihan antar individu atau kelompok.

Implementasi nilai-nilai Pancasila untuk Era Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia memerlukan strategi yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut beberapa pengamalan nilai-nilai Pancasila terkait demokrasi di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demokratis: Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus diterapkan prinsip-prinsip yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Setiap orang harus mempunyai kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembangunan harus dilakukan secara demokratis, dengan menghormati kebebasan orang lain, dan harus dilakukan keterbukaan terhadap kritik, pertimbangan, dan perbandingan dengan penemuan-penemuan teoritis lainnya.
2. Menghargai kebebasan orang lain : Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap orang wajib menghormati kebebasan orang lain. Hal ini menjamin perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya sejalan dengan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
3. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi : Nilai-nilai harus diintegrasikan ke dalam pengembangan IPTEK diarahkan pada kesejahteraan manusia. Perkembangan IPTEK tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi tetapi juga pada kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Implementasi nilai-nilai demokrasi di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan upaya bersama antara pemerintah, industri teknologi, masyarakat sipil, dan individu. Di era digital, memperkuat institusi demokrasi agar bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sangatlah penting. Hal ini termasuk memodernisasi sistem pemungutan suara, memastikan keamanan dan integritas pemungutan suara elektronik, dan memperkuat otoritas pengatur untuk mengatasi tantangan digital.

Pancasila perlu diimplementasikan sebagai ideologi yang terbuka untuk menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa di era globalisasi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dicapai dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Lebih lanjut, perlunya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru dan perlindungan terhadap nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar pada budaya Indonesia dan memerlukan peran serta masyarakat luas. Kesimpulannya, perwujudan nilai-nilai demokrasi di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan peran Pancasila sebagai pedoman normatif pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia dan pelindung nilai-nilai inti bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Astuti, N. R., & dkk. (2021). Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK. *Journal of Education, psychology and conseling*, 41-49.
- Djafar, T., & dkk. (2020). *Sistem Demokrasi Pancasila*. Depok: Rajawali Pers.

- Haifarashin, R., & Dewi, D. A. (2020). Pengimplementasian Sistem Demokrasi Pancasila dalam Organisasi Kepemudaan Karang Taruna. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3974-3980.
- Listiya Wardhani, L. T., & dkk. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 305-318.
- Marsono. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: In Media.
- Nurohmah, W., & Dewi, D. A. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1045-1049.
- Rahmatullah, I., & Atikah, I. (2022). Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi: Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi. *Wajah Hukum*, 386-400.
- Safitri, A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial. *Jurnal of Education, Psychology and Conseling*, 78-87.
- Taniredja, T., & dkk. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan : Paradigma Baru Untuk Mahasiswa*. Bandung: ALFABETA.
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Jurnal Transnasional*, 881-894.